

Di Balik Angka 5,12%: Bedah Anomali Data Pertumbuhan Ekonomi dan Kritik Keras CELIOS

Ihsan Faris Kurnia

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Give Your Opinion (November)</p>	<p>Rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% pada Kuartal II 2025 memicu polemik serius karena dinilai paradoksal dengan kondisi riil di lapangan, seperti penurunan konsumsi rumah tangga saat Lebaran dan kontraksi sektor manufaktur yang disorot oleh <i>Center of Economic and Law Studies</i> (CELIOS). Melalui perspektif ekonomi syariah, tulisan ini mengkritisi validitas data tersebut yang berpotensi melanggar prinsip kejujuran (<i>sidq</i>) dan terindikasi sebagai praktik <i>tadlis</i> (manipulasi) informatif demi pencitraan politik. Ketidakakuratan ini dinilai berbahaya karena tidak hanya menyesatkan kebijakan fiskal, tetapi juga memicu <i>exclusion error</i> fatal dalam pengelolaan ZISWAF, di mana kaum <i>dhuafa</i> berisiko kehilangan haknya akibat kesalahan diagnosis tingkat kesejahteraan. Mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun bahwa manipulasi adalah bentuk kezaliman yang merusak kepercayaan (<i>trust</i>), penulis menekankan pentingnya audit independen terhadap metodologi statistik dan penegakan transparansi mutlak sebagai prasyarat menjaga keadilan distributif serta keberlangsungan tatanan negara (<i>hifz al-dawlah</i>).</p>
<p>Keywords:</p> <p><i>Pertumbuhan Ekonomi, Validitas Data, Ekonomi Syariah, ZISWAF, Ibnu Khaldun</i></p>	
<p>Editor:</p> <p>Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator vital yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan merumuskan kebijakan masa depan. Validitas data makroekonomi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi bagi kesejahteraan rakyat. Jika data yang disajikan bias atau tidak mencerminkan realitas lapangan seperti anomali kenaikan PDB 5,12% di tengah kontraksi manufaktur dan penurunan daya beli maka kebijakan yang diambil (misalnya: pencabutan subsidi atau penundaan bantuan sosial) berpotensi salah sasaran dan justru menzalimi masyarakat rentan. Oleh karena itu, transparansi data adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya kebijakan yang berkeadilan.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% (YoY) pada Kuartal II 2025. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak Kuartal II 2023 dan melampaui berbagai prediksi analis pasar. Namun, alih-alih disambut dengan optimisme, rilis data ini justru memicu gelombang skeptisisme dari kalangan ekonom dan lembaga riset. Di tengah klaim pertumbuhan yang impresif, sejumlah indikator riil di lapangan justru menunjukkan performa yang bertolak belakang.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti adanya anomali serius antara angka statistik makro dengan kondisi mikro yang dialami masyarakat dan pelaku industri. Sebagai lembaga yang vokal mengkritisi data tersebut, CELIOS adalah institusi riset independen yang mendedikasikan diri untuk melawan ketimpangan sistemik dan krisis iklim melalui pendekatan interdisipliner. Visi utama lembaga ini adalah menjadi pusat penelitian yang kredibel, berkualitas, dan bebas dari intervensi kepentingan, dengan filosofi bahwa kebijakan fiskal, lahan, dan energi harus melayani rakyat dan ekosistem, bukan kepentingan oligarki semata.

Dalam menjalankan misinya, CELIOS tidak hanya berfokus pada analisis makroekonomi, tetapi juga aktif memperkuat suara komunitas lokal, buruh, dan masyarakat adat yang sering kali terpinggirkan oleh dampak industri ekstraktif. Agenda reformasi mereka menuntut adanya stabilisasi, demokratisasi, dan realokasi sumber daya agar struktur pemerintahan menjadi alat untuk keadilan dan ketahanan (*resilience*), bukan sekadar instrumen pertumbuhan angka. Kritik keras mereka terhadap data BPS kali ini sejalan dengan misi lembaga untuk memperkuat ruang sipil melalui riset kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based research*).

Dengan melihat semua fakta di atas, studi kasus mengenai validitas data pertumbuhan ekonomi ini sangat penting untuk dibahas. Hal ini menyentuh kerangka ekonomi syariah yang tidak hanya peduli pada hasil akhir berupa angka pertumbuhan, tetapi juga pada proses validasi yang transparan, keberpihakan pada kaum rentan, dan apakah kebijakan yang lahir dari data tersebut benar-benar membawa keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat.

PEMBAHASAN

Keraguan terhadap angka pertumbuhan ekonomi 5,12% bukanlah asumsi kosong, melainkan didasarkan pada berbagai anomali data yang serius. Salah satu paradoks terbesar terlihat pada sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Meskipun Kuartal II 2025 bertepatan dengan momen Idul Fitri, riset CELIOS justru mencatat penurunan dampak ekonomi Lebaran sebesar 16,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Menjadi sebuah tanda tanya besar bagaimana ekonomi agregat diklaim tumbuh rekor ketika belanja masyarakat sebagai mesin penggerak utamanya justru mengalami penurunan omzet yang signifikan.

Ketimpangan pada sisi konsumsi ini berjalan paralel dengan kondisi yang mengkhawatirkan di sektor manufaktur. Terjadi ketidaksambungan atau *decoupling* yang mencolok di mana PDB dilaporkan naik, sementara *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur konsisten berada di zona kontraksi. Secara logika ekonomi, sulit menerima adanya lonjakan nilai tambah ketika pabrik-pabrik justru mengerem produksi dan melakukan gelombang PHK. Fenomena ini mengindikasikan gejala *jobless growth*, di mana angka pertumbuhan seolah meninggi namun digerakkan oleh sektor yang minim penyerapan tenaga kerja.

Selain indikator fisik, sorotan tajam juga diarahkan pada potensi distorsi metodologis dalam perhitungan PDB Riil. Para ekonom menduga otoritas statistik menggunakan angka deflator yang terlalu rendah, padahal realitas harga kebutuhan pokok di lapangan masih sangat mencekik. Jika inflasi dicatat lebih rendah dari kenyataan, maka secara matematis angka pertumbuhan ekonomi akan terlihat menggelembung di atas kertas. Sejatinya, kenaikan tersebut hanyalah efek inflasi harga, bukan merupakan peningkatan volume produksi yang riil.

Puncak dari keraguan validitas data ini terkonfirmasi ketika diuji menggunakan logika dasar arus modal dan fungsi produksi. Teori ekonomi mensyaratkan bahwa peningkatan *output* seharusnya sejalan dengan peningkatan *input*, namun data justru menunjukkan realisasi investasi asing dan impor bahan baku melemah. Menjadi sebuah misteri ekonometrika tersendiri bagaimana Indonesia bisa menghasilkan *output* ekonomi yang melesat tinggi di saat *input* modalnya berkurang. Anomali ini semakin memperkuat dugaan bahwa angka pertumbuhan tersebut tidak berdiri di atas fundamental yang kokoh.

Ketidakpercayaan terhadap anomali data ini telah mendorong langkah desakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. CELIOS dilaporkan telah mengirimkan surat resmi kepada Badan Statistik PBB untuk mendesak dilakukannya audit independen terhadap metodologi pelaporan data Indonesia. Langkah drastis ini diambil demi memastikan standar transparansi global terpenuhi dan menjaga kredibilitas statistik nasional. Tujuannya adalah mencegah dugaan manipulasi data yang hanya berorientasi pada pencitraan politik semata tanpa mencerminkan kondisi riil.

Polemik mengenai validitas data pertumbuhan ekonomi ini membuka ruang diskusi krusial mengenai urgensi penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Dalam kacamata ekonomi Islam, pertumbuhan bukan sekadar soal pencapaian angka agregat semata, melainkan sangat bergantung pada validitas kebenaran (*sidq*) dan keadilan distribusi.

Landasan utamanya merujuk pada prinsip kejujuran data, di mana Islam mewajibkan pemerintah untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 119. "*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur).*" (QS. At-Taubah: 119). Oleh karena itu, integritas dalam penyajian data makroekonomi adalah fondasi moral yang tidak bisa ditawar dalam pengelolaan negara.

Dalam konteks pelaporan kinerja ekonomi, memanipulasi data atau melakukan *tadlis* hukumnya haram karena dapat menyesatkan kebijakan publik dan merugikan rakyat banyak. Menyajikan "angka cantik" pertumbuhan agregat namun menyembunyikan fakta ketimpangan distribusi atau tingginya inflasi pangan dikategorikan sebagai bentuk *tadlis informatif*. Pemerintah sebagai pengelola amanah negara dilarang keras menciptakan *asymmetric information* atau ketimpangan informasi kepada rakyatnya, karena hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap transparansi publik yang seharusnya dijunjung tinggi.

Implikasi dari ketidakjujuran data ini sangat fatal, sebab ekonomi syariah menuntut transparansi mutlak agar setiap kebijakan yang diambil seperti penyaluran bantuan sosial atau penetapan pajak dapat tepat sasaran. Menyajikan angka pertumbuhan yang tinggi di atas kertas sementara indikator fundamental seperti daya beli dan investasi riil menurun adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip *sidq*. Dalam konteks modern, hal ini berkaitan erat dengan integritas metodologi pengumpulan data yang harus steril dari upaya rekayasa demi pencitraan politik sesaat (Chapra, 1995).

Selain aspek kejujuran, ekonomi syariah juga sangat menekankan pada pertumbuhan yang berbasis aktivitas sektor riil (*real sector*) dan melarang transaksi yang didominasi unsur spekulatif (*gharar*). Jika klaim pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor keuangan yang tidak berpijak pada produksi barang dan jasa nyata, seperti manufaktur yang justru mengalami kontraksi maka pertumbuhan tersebut dianggap rapuh atau sekadar "kosmetik". Ekonomi Islam menghendaki pertumbuhan yang kokoh, yang dihasilkan dari produktivitas nyata, bukan dari gelembung ekonomi yang sewaktu-waktu bisa pecah.

Akhirnya, segala pencapaian angka pertumbuhan seperti 5,12% menjadi tidak bermakna dalam Islam jika ketimpangan di tengah masyarakat justru semakin melebar. Prinsip keadilan (*adl*) menuntut *inclusive growth*, di mana kue pembangunan tidak hanya beredar di kalangan elit saja, sesuai dengan peringatan Allah dalam QS. Al-Hashr ayat 7 agar harta tidak hanya berputar di antara orang kaya. Melalui instrumen ZISWAF dan pelarangan riba, ekonomi syariah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan dampaknya oleh kaum dhuafa melalui harga pangan yang terjangkau dan ketersediaan lapangan kerja yang layak.

Ketidakakuratan data makroekonomi memiliki korelasi langsung yang fatal terhadap efektivitas pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Jika data ekonomi dikelembungkan, tingkat kemiskinan akan terlihat lebih rendah dari realitasnya sehingga memicu *exclusion error* pada pendataan mustahiq (BAZNAS, 2024). Akibatnya, banyak masyarakat miskin yang sebenarnya berhak menerima zakat justru tidak terdata karena indikator statistik negara menganggap mereka mampu. Hal ini menghambat fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif karena diagnosis awal terhadap kondisi umat sudah keliru.

Selain dampak bias data yang memicu kebijakan fiskal kontraproduktif, urgensi kejujuran ekonomi juga menemukan relevansi vitalnya dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam mahakaryanya, *Muqaddimah*, bapak ekonomi Islam ini menegaskan bahwa keadilan (*al-adl*) adalah fondasi utama bagi tegaknya peradaban (*umran*), seraya mengingatkan bahwa "kezaliman adalah perusak kemakmuran" (*al-zulm mu'dzin bi kharab al-umran*). Dalam konteks modern, manipulasi data dapat dimaknai sebagai bentuk kezaliman intelektual yang memicu siklus keruntuhan negara dimulai dari hilangnya kepercayaan (*trust*) (Khaldun, 2011).

Ketika penguasa tidak jujur dalam menakar kondisi ekonomi, para pelaku usaha akan kehilangan insentif, investasi akan lari, dan produksi akan berhenti. Kondisi "pertumbuhan tanpa pembangunan" atau pertumbuhan kosmetik 5,12% ini persis seperti gejala kemewahan semu di atas pondasi yang rapuh; jika tidak segera dikoreksi dengan audit transparan yang berbasis prinsip *Sidq*, Indonesia berisiko mengalami kemunduran struktural di mana angka statistik tetap tinggi namun kesejahteraan rakyat hancur tak berbekas. Oleh karena itu, menjaga validitas data bukan sekadar masalah administrasi statistik, melainkan upaya fundamental menjaga keberlangsungan negara (*hifz al-dawlah*) itu sendiri, karena pertumbuhan yang dibangun di atas ilusi data tidak akan pernah berkelanjutan (*sustainable*) dan justru mempercepat keruntuhan struktur ekonomi.

PENUTUP

Polemik yang mengemuka di balik angka pertumbuhan ekonomi 5,12% pada Kuartal II 2025 menegaskan bahwa permasalahan ini melampaui sekadar perdebatan metodologis statistik antara pemerintah dan lembaga riset independen seperti CELIOS. Ini merupakan sebuah pertarungan besar menyangkut integritas negara dan nasib kesejahteraan rakyat yang paling rentan. Berbagai anomali data, mulai dari paradoks konsumsi Lebaran, kontraksi sektor manufaktur, hingga teka-teki pelemahan investasi, memberikan sinyal kuat bahwa angka tersebut berisiko hanyalah ilusi statistik yang rapuh, tidak berpijak pada sektor riil yang kokoh.

Dalam bingkai filsafat ekonomi syariah, fenomena ini menghasilkan peringatan keras. Manipulasi data (*tadlis*) dalam pelaporan makroekonomi adalah bentuk kezaliman struktural (*al-zulm*) yang dilarang, karena secara langsung merusak prinsip kejujuran (*siddiq*) dan *amanah* yang diemban negara. Kegagalan diagnosis akibat data yang bias memiliki implikasi nyata, terutama berpotensi memicu ***fatal exclusion error*** dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), di mana kaum *dhu'afa* yang seharusnya menerima bantuan justru tereliminasi karena negara menganggap mereka "sudah sejahtera" di atas kertas.

Sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Khaldun, kepercayaan (*trust*) adalah mata uang termahal dan fondasi bagi tegaknya sebuah peradaban (*umran*). Jika pemerintah terus memaksakan narasi pertumbuhan yang tidak sinkron dan tidak dirasakan oleh akar rumput, Indonesia berisiko terjebak dalam siklus "pertumbuhan tanpa pembangunan" yang tidak berkelanjutan (*unsustainable*) dan pada akhirnya berujung pada kemunduran struktural.

Oleh karena itu, transparansi data bukanlah lagi pilihan, melainkan sebuah kewajiban mutlak (*kewajiban syar'i* dan *kewajiban konstitusional*). Masa depan kebijakan berkeadilan di Indonesia menuntut otoritas statistik untuk segera melakukan audit metodologis yang independen dan terbuka. Sebab, sejatinya indikator keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya bukanlah grafik PDB yang menjulang tinggi di laporan resmi, melainkan ketersediaan pangan yang terjangkau dan keadilan ekonomi yang dirasakan nyata di setiap rumah tangga rakyat Indonesia.

REFERENSI

- CELIOS. (2025, Oktober 21). *CELIOS Sends Letter to UN Over Suspected Irregularities in Indonesia's Economic Growth Data*. Center of Economic and Law Studies. <https://celios.co.id/celios-sends-letter-to-un-over-suspected-irregularities-in-indonesias-economic-growth-data/>
- CELIOS. (2025, Mei). *Press Release: Economic Impact of Lebaran 2025 Softens, GDP Contribution Falls to Rp140.7 Trillion*. Center of Economic and Law Studies. <https://celios.co.id/press-release-economic-impact-of-lebaran-2025-softens-gdp-contribution-falls-to-rp140-7-trillion-down-16-5-from-last-year/>
- Kompas.com. (2025, Oktober 21). *CELIOS: Pertumbuhan Ekonomi Tak Sampai di Meja Masyarakat, Beras Masih Mahal*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/21/00005841/celios-pertumbuhan-ekonomi-tak-sampai-di-meja-masyarakat-beras-masih-mahal>
- Republika. (2025, Oktober). *Ekonom CELIOS Beberkan Sejumlah Kejanggalan di Balik Pertumbuhan Ekonomi*. Republika Online. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/t598n9490/ekonom-celios-beberkan-sejumlah-kejanggalan-di-balik-pertumbuhan-ekonomi-504-persen>
- Tempo.co. (2025, Oktober). *CELIOS Minta Badan Statistik PBB Audit Laporan Pertumbuhan Ekonomi BPS*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/celios-minta-badan-statistik-pbb-audit-laporan-pertumbuhan-ekonomi-bps-2056550>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Nasional*. Puskas BAZNAS.
- Ibnu Khaldun. (2011). *Muqaddimah* (A. T. Al-Asy'ari, Terjemahan). Pustaka Al-Kautsar.
- Chapra, M. U. (1995). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.